



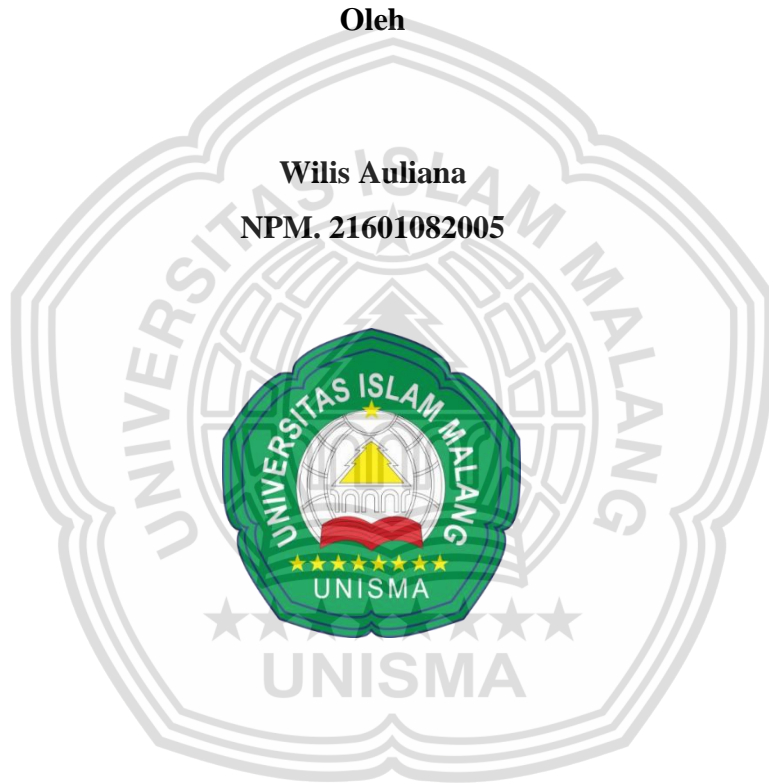
**ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2018**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Wilis Auliana
NPM. 21601082005



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2020

ABSTRAKSI

Tujuan Penelitian Ini Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016-2018 dalam hal keuangan dan diukur dari Laporan Realisasi Anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena atau populasi tertentu yang peneliti peroleh pada subjek yang dilakukan untuk mengetahui variabel independen, baik satu atau lebih variabel independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif berdasarkan Laporan Keuangan Anggaran (LRA), yaitu konsep anggaran, terutama analisis perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Data diperoleh langsung dari Kantor BAKD. Hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten Malang dikatakan baik dalam menjalankan kinerja keuangan, tetapi hanya sedikit evaluasi yang harus ditingkatkan dalam mengelola desentralisasi, PAD, dan perbedaan pendapatan. Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Malang dalam mengalokasikan Anggaran Belanjanya dikatakan efisien, tidak menunjukkan pemborosan anggaran. Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang selama 3 tahun berjalan efektif dengan menghadirkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran, Kinerja APBD



ABSTRACT

The Purpose of This Research The purpose of this study was to analyze the performance of the Malang Regency Government Revenue and Expenditure Budget in 2016-2018 in financial terms and measured from the Budget Realization Report. This type of research used in this research is descriptive type of research. Descriptive research is research about a particular phenomenon or population that researchers obtain on the subject which is conducted to find out the independent variables, either one or more independent variables without making comparisons or connecting with other variables. The analytical method used in this study uses descriptive analysis based on the Budget Financial Report (LRA), namely the concept of the budget, especially the analysis of budget planning and budget realization. Data obtained directly from the BAKD Office. The results of this study Malang Regency Government said to be good in carrying out financial performance, but only a few evaluations that must be improved in managing decentralization, PAD, and income differences. The performance of the Malang Regency Government's APBD in allocating its Shopping Budget is said to be efficient, not indicated budget waste. Realization of Malang Regency Government Budget for 3 years running effectively by presenting the Budget Realization Report (LRA) in accordance with applicable procedures.

Keywords: *Budget Planning, Budget Realization, APBD Performance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di seluruh dunia pasti memiliki perencanaan anggaran untuk tata kelola negara yang di realisasikan dalam bentuk pelayanan publik fungsinya menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat. Pengelolaan, perencanaan yang baik akan menghasilkan laporan yang akurat dan tidak menimbulkan rasa kecurigaan. Pemerintah yang menjalankan dinasti pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta perkembangan atau pembangunan daerah diharuskan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan laporan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang bebas korupsi maupun penyelewengan dana.

Berdasarkan pasal 18A ayat 2 menyebutkan bahwa “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Terciptanya sistem pemerintah untuk melakukan perubahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi untuk memberikan suatu harapan yang amat besar bagi negara Indonesia untuk melahirkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.

Upaya konkrit salah satunya adalah yang dilakukan pemerintah dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun

berdasarkan peraturan pemerintah melalui PP No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar ini di jadikan acuan pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan laporan yang akurat. Laporan yang dibuat pemerintah seharusnya meliputi Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi anggaran, dan catatan atas Laporan Keuangan.

Penyelenggaraan aktivitas anggaran dana pemerintah daerah tak bisa lepas dari adanya pemanfaatan serta penggunaan anggaran pendapatan setiap daerah. Setiap periode pemerintah harus *planning* perencanaan anggaran, atau bisa dikatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran pemerintah berkaitan dengan total ketentuan pengadaaan anggaran terhadap setiap aktivitas serta program yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran adalah landasan target perencanaan yang wajib di capai oleh Pemerintah, dan alat sebagai pengendalian alokasi sumber dana publik yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk di distribusikan sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah didukung oleh pengadaaan kas pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan secara nasional.

Pemerintah menciptakan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah menjadi landasan hukum APBD/APBN. Instansi pemerintah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk merealisasikan anggaran (Novita, 2014)

Menurut UU RI No. 17 tahun 2003, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pemerintah daerah untuk melaksanakan semua janji, kewajiban, dan kebijakan untuk di implementasikan ke dalam pelaksanaan yang akan diambil, hasil yang dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang membayar biaya-biaya tersebut dinamakan APBD (Hasan, 2015)

Menurut Lewis dan Oesterman (2009) salah satu rendahnya penyerapan karena kurang waspada pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan pengeluaran keuangan yang tinggi. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah nominal yang besar untuk meningkatkan penerimaan, mengurangi defisit anggaran, serta mengurangi penerimaan dana bersumber dari dana perimbangan dengan tujuan memajukan kemandirian daerah. Penerimaan dana oleh pemerintah pusat masih sangat tinggi, dalam hal ini membuktikan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah jika melaksanakan merealisasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus melihat *value for money*. Ferina, 2016 menyatakan bahwa landasan *value for money* pada menganalisis kinerja pemerintah daerah yaitu dalam alokasi dan pengadaan sumber daya, efektif yang artinya mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan memaksimalkan

hasilnya, dan efektif atau berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sangat berperan penting terhadap pemerintah daerah, maka dari itu pemerintah diharuskan melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan sempurna. Menurut (Ramadhan, 2015) mengemukakan bahwa pelaksanaan serta perencanaan APBD yang buruk akan menimbulkan tidak terwujudnya target penerimaan serta tak terealisasinya program maupun kegiatan sehingga menghasilkan sisa kurang/lebih perhitungan anggaran yang tinggi pada tahun tersebut. Permasalahan paling utama yang sering kali terjadi adalah rendahnya daya serap anggaran.

Penyusunan rencana anggaran pada suatu Pemerintah Daerah sangat erat dengan kondisi di daerah tersebut. Para penyusun anggaran ini berhubungan erat dengan pengkoordinasian kerja, dan pengawas kerja. Maka dari itu perencanaan anggaran yang baik dan sempurna tidak akan menjamin bahwa pelaksanaan dan realisasi akan baik dan sempurna juga tanpa dikelola oleh para pemerintah yang baik, terampil, dan jujur.

Jika terjadi perbandingan antara perencanaan anggaran dan realisasinya tersebut ditemukannya penyimpangan maka perbedaan tersebut harus diteliti dan direvisi. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya penyelewengan dana, dan mencegah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang dibuat sebagai acuan untuk program kerja yang akan datang, dan mencegah asumsi masyarakat yang negatif.

Pengaruh akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap tingkat kecurangan atau korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh pada tingkat korupsi pemerintah di Indonesia, yang artinya pemerintah diwajibkan mempunyai laporan keuangan yang memiliki unsur transparansi dan akuntabilitas (Setiawan, 2012). Kemajuan serta perkembangan di negara Indonesia saat ini sangat bertumbuh dengan pesat di sektor pemerintahan, terbukti dengan banyaknya pembangunan pembangunan baik berupa jalan tol, dan ekonomi kreatif lainnya.

Pemerintah Daerah bebas berinisiatif untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, dengan syarat tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari otonomi daerah harus dikaitkan dengan pemerintah dan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum yang lebih baik. Pelayanan kepada masyarakat baik berupa pengungkapan informasi pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Perkembangan teknologi saat ini sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Pertukaran informasi melalui teknologi digital lebih mudah dan murah di bandingkan dengan proses manual. Teknologi informasi meliputi penggunaan teknologi seperti *web*, *internet*, dan *e-government*. Masih banyak bentuk teknologi yang lain yang bisa menunjang kemajuan entitas ekonomi agar lebih mudah. Pemerintah Daerah di Indonesia

hampir semuanya memiliki halaman *website* masing-masing dengan kelengkapan dan kualitas yang berbeda beda. Setiap *website* tersebut selalu memaparkan informasi umum tentang daerah tersebut. Mengenai informasi laporan keuangan daerah, tidak semua *website* pemerintah daerah menyediakan informasi laporan keuangan. Seiring berjalanya waktu pemerintah Kab. Malang satu persatu terungkap atas dugaan kasus penyelewengan dana di Kab Malang. Mulai dari DPRD Kota Malang hingga Bupati Malang di periksa oleh KPK.

MalangVoice – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan *investigasi* ulang di kantor Polres Malang Kota, Mengenai tindak lanjut dari dugaan kasus korupsi serta gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 dengan nominal Rp 7 miliar, yang menyeret Bupati Malang non aktif Rendra Krensa, senin (26/11). Sebelumnya, 47 saksi sudah diperiksa di Polres Malang pada 16 oktober 2018, saat ini ada 11 orang Aparatur Sipil negara (ASN) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan rekanan swasta juga di periksa oleh Tim Penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Menurut informasi yang di kumpulkan oleh MVoice, tampak mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Suwandi, dan Sekretaris Dinas Pendidikan, Pudianto, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Malang, Willem Petrus Salamena, serta beberapa ASN dan dua orang swasta yang menghadiri pemanggilan ini. Dalam kasus ini KPK

sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu Rendra Kresna selaku penerima suap dan gratifikasi dana DAK 2011, Ali Murtopo dan Eryk Armando Talla selaku rekanan swasta.

Dari pemaparan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa faktor yang berpengaruh atas akuntabilitas laporan keuangan di sektor pemerintah daerah, menganalisis tentang perencanaan anggaran dan realisasi dana dalam beberapa periode kebelakang. Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang terjadi diatas maka peneliti memilih judul **“ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, inti dari permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat di rumuskan “Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2018?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu: Untuk mengetahui serta menganalisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten Malang

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan antara selisih perencanaan anggaran dan realisasi anggaran apakah sesuai dengan yang di rencanakan. Selain itu masyarakat di harapkan tidak tabu lagi membaca Laporan Keuangan Kabupaten Malang, serta menjadikan masyarakat lebih kritis lagi terhadap penyelewengan anggaran dana oleh pihak pihak curang dan dapat membandingkan antara perencanaan dan realisasi besar selisihnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menyumbang ide bagi pemerintah kabupaten malang dalam mengambil kebijakan dalam hal meningkatkan laporan keuangan yang akurat. Perencanaan anggaran di buat sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang fasilitas di Kabupaten Malang, sehingga realisasi anggaran tepat dapat terhindar dari penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu, dan tidak menimbulkan asumsi negatif dari masyarakat yang merugikan lembaga instansi tersebut. Penelitian



ini di harapkan dapat menjadi suatu evaluasi laporan keuangan pemerintah kabupaten Malang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadikan sebuah acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Akademik

Memberikan informasi kepada masyarakat, menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Hasil kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum bisa dikatakan relatif baik, meskipun ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu Andre P dan Tresje (2015) dengan penelitian berjudul “Analisis Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa” bahwa realisasi pendapatan dikatakan relatif baik, namun dalam hal belanja sudah dikatakan baik.

- a. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dilihat dari Varians Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang selama Tahun 2016-2018, secara umum belum dikatakan baik karena pada tahun 2016 dan 2018 terdapat selisih kurang. Dalam 3 periode mengalami selisih lebih hanya pada tahun 2017 sebesar Rp 41.568.568.252
- b. Rata-rata derajat desentralisasi Kabupaten Malang tahun 2016-2018 dibawah 50%. Hal ini memperlihatkan bahwa kemampuan pemerintah

Kabupaten Malang masih dikatakan belum baik karena dalam 3 periode masih dibawah 50%.

- c. Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Malang dilihat dari Rasio Efektivitas Pajak selama 3 periode yaitu tahun 2016-2018 sudah bisa dikatakan baik dalam mengumpulkan pajak daerah karena pada 3 periode tersebut melebihi 100%
- d. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Belanja Kabupaten Malang dilihat dari Analisis Efisiensi Belanja Daerah bisa disimpulkan telah melakukan efisiensi anggaran dihasilkan dari analisis varians belanja kurang dari 100% maka dinilai telah melakukan efisiensi anggaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran belanja.
- e. Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Kabupaten Malang dilihat dari Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Malang rata rata dibawah 50% dan dari analisis ini bisa diketahui berapa porsi dari total belanja daerah direalisasikan untuk investasi
- f. Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Malang dilihat dari Total Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja pendistribusian total belanja daerah tidak seimbang, karena anggaran total belanja daerah lebih banyak di alokasikan kepada belanja tidak langsung.
- g. Kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dilihat dari Analisis Efisiensi Belanja dapat disimpulkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Malang sudah efisien dalam mengalokasikan anggaran belanja karena persentase realisasi anggaran belanja dibawah 100%

- h. Realisasi kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Malang selama 3 periode berjalan dengan efektif dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan tanggung jawab dalam mendistribusikan keuangan melalui Badan Keuangan dan Asset Daerah cukup baik dan relatif terwujud setiap target keuangan.

5.2 Saran

Menurut hasil penelitian serta hal-hal yang tercantum dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran seperti berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang

Pemerintah Kabupaten Malang harus meningkatkan PAD Kabupaten Malang dengan menambah efisiensi untuk beberapa pos berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Apabila, Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan lebih maksimal dalam pemungutan pajak dan menambah pemasukan PAD maka bisa dikatakan efisiensi lebih meningkat.

- b. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya pada 3 tahun yaitu tahun 2016 sampai 2018. Diharapkan penelitian berikutnya menambah periode tahun penelitian agar



lebih akurat dalam menganalisis Kinerja APBD Pemerintah Kabupaten
Malang.



DAFTAR PUSTAKA

- Addina Mazzira. (2009). *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Anak Agung Istri Maharani, Putu Agus Ardiana. (2015). *Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, dan Budaya Organisasi Pada Senjangan Anggaran*. Fakultas Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Andre dan Treesje. (2015). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Jurusan Akuntansi Univeritas Sam Ratulangi Manado.
- As Syiffa Nurillah. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Atika Mardhanila Anam. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah Pada Website Pemerintah Daerah*. Universitas Negri Malang.
- Dealice ivana, dkk. (2018). *Analisis Perencanaan dan Penggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015*. Universitas Sam Ratulangi.
- Ferdian Silviano Putra. (2019). *Pentingnya Analisis Rasio Laporan Realisasi Dalam Keuangan Instansi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Pada Tahun (2013-2017)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- <https://malangvoice.com/kpk-lanjutkan-pemeriksaan-11-saksi-kasus-bupati-malang-di-polres-makot>
- Lilis Marlina. (2015). *Efek Ratcheting Dalam Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Universitas Teuku Umar
- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Meita Sawang, Yayuk Nurjanah. (2015). *Analisa Anggaran dan Realisasi dengan Metode Varians Terhadap Laporan Laba Rugi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor

- Neco Fransiska, DKK. (2016). *Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Fakultas ekonomi Slamet Riyadi Surakarta.
- Novtania Mokoginta, Dkk. (2017). *Pengaruh sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Risca Yunia Lestari. (2017). *Analisis Target Perencanaan dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Langkap*. UIN Sumatera Utara.
- Ramlah Basri. (2013). *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Univeritas Sam Ratulangi Manado.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-23, Alfabeta, Bandung.

